jdih.salatiga.go.id

SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu mengatur klasifikasi arsip;
b. bahwa sehubungan adanya kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 115 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
8. Kode Klasifikasi Arsip adalah symbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.
9. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
10. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum pengklasifikasian Arsip.

Pasal 3

Pengaturan Klasifikasi Arsip bertujuan untuk:
a. menciptakan keseragaman Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan dan pengelompokan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;

b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya sinkronisasi informasi kearsipan Pemerintah Daerah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II
KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

(1) Klasifikasi Arsip dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip terdiri atas:
    a. fungsi fasilitatif; dan
    b. fungsi substantif.
(2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
(3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 5

(1) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.
(2) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan kembali Arsip.

Pasal 7

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan Arsip Dinamis.
(2) Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sekretariat atau unit kerja kearsipan Perangkat Daerah.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 8

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan Klasifikasi Arsip meliputi:
    a. pendampingan, sosialisasi dan publikasi;
    b. pelatihan teknis kepada petugas kearsipan; dan
    c. monitoring dan evaluasi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

jdih.salatiga.go.id

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 15 Juni 2023

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023 NOMOR 12

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



ANDRIANI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19700430 199703 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA

000 UMUM

000.1 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN

- 000.1.1 Telekomunikasi
- 000.1.2 Perjalanan Dinas Dalam Negeri
  - 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.1.3 Perjalanan Dinas Luar Negeri
  - 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
  - 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
  - 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
- 000.1.4 Penggunaan Fasilitas Kantor (antara lain: Permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya)
- 000.1.5 Rapat pimpinan antara lain: Notula/Risalah Rapat
- 000.1.6 Penyediaan Konsumsi
- 000.1.7 Pengurusan Kendaraan Dinas
  - 000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
  - 000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
  - 000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
- 000.1.8 Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
  - 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
  - 000.1.8.2 Penghijauan
  - 000.1.8.3 Perbaikan Gedung
  - 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
  - 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
  - 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
- 000.1.9 Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
  - 000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
  - 000.1.9.2 Pemasangan
- 000.1.10 Ketertiban dan Keamanan
  - 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
  - 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan
- 000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir
- 000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2 PERLENGKAPAN

000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan
- 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
- 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan

000.2.2 Pemeliharaan peralatan kantor
- 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor
- 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

000.2.3 Distribusi
- 000.2.3.1 Barang habis pakai
- 000.2.3.2 Barang milik daerah

000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan

000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN

000.3.1 Rencana pengadaan Barang dan jasa (antara lain: : Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan)

000.3.2 Pengadaan Langsung (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang (antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak)

000.3.4 Swakelola (antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi)

000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan antara lain : Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

000.3.6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.4.2 Deposit Bahan Pustaka
- 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
- 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
- 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional
- 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

	000.4.2.5	Bibliografi dan Katalog
000.4.3	Koleksi Pustaka	
	000.4.3.1	Pembelian
	000.4.3.2	Hibah
	000.4.3.3	Hadiah
	000.4.3.4	Tukar Menukar
	000.4.3.5	Implementasi Undang-Undang KCKR
	000.4.3.6	Terbitan Internal
	000.4.3.7	Pendistribusian bahan pustaka surplus
	000.4.3.8	Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
000.4.4	Pengolahan Bahan Pustaka	
000.4.5	Pangkalan Data Katalog Koleksi	
000.4.6	Layanan Perpustakaan	
	000.4.6.1	Keanggotaan
	000.4.6.2	Peminjaman
	000.4.6.3	Pengembangan gemar baca
000.4.7	Kerjasama Perpustakaan	
	000.4.7.1	MoU
	000.4.7.2	Perjanjian kerjasama
	000.4.7.3	Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
000.4.8	Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan	
	000.4.8.1	Pengembangan situs web
	000.4.8.2	Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
	000.4.8.3	Pengembangan program aplikasi perpustakaan
	000.4.8.4	Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital
000.4.9	Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	
000.4.10	Konservasi	
	000.4.10.1	Perawatan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.2	Perbaikan Bahan Perpustakaan
	000.4.10.3	Penjilidan Bahan Perpustakaan
000.4.11	Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)	
000.4.12	Transformasi Digital	
000.4.13	Kurasi Digital	
000.4.14	Pengembangan Perpustakaan	
	000.4.14.1	Perpustakaan Umum
	000.4.14.2	Perpustakaan Khusus
	000.4.14.3	Perpustakaan Sekolah
	000.4.14.4	Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5	**KEARSIPAN**	
000.5.1	Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
000.5.2	Pembinaan Kearsipan	
	000.5.2.1	Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
	000.5.2.2	Bimbingan Konsultasi Arsiparis
	000.5.2.3	Penilaian Arsiparis

	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain : Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain : Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, antara lain : Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain : Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan (antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi)
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif (antara lain: daftar berkas dan daftar isi berkas)
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif (antara lain: daftar arsip inaktif, daftar arsip inaktif tematik)
	000.5.3.4	Penggunaan (antara lain: daftar arsip dinamis berdasarkan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, bukti peminjaman arsip)
	000.5.3.5	Autentikasi Arsip Dinamis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentisitas arsip dinamis)
000.5.4	Program Arsip Vital (antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital dan Pemulihan Arsip Vital)	

000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga (antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentifikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

000.5.6 Penyusutan Arsip

000.5.6.1 Pemindahan Arsip (antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan)

000.5.6.2 Pemusnahan Arsip (antara lain: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar Arsip Yang Dimusnahkan.

000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis (antara lain: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan)

000.5.7 Alih Media Arsip (antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang alih mediakan)

000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

000.5.9.1 Akuisisi (antara lain : Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip, Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan, Daftar Arsip yang diserahkan

000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

000.5.9.3 Sejarah Lisan (antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaser/CD/media lain sesuai perkembangan TI, dan Transkip)
000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis (antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis)
000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik (antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide)
000.5.9.6 Preservasi Preventif (antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
000.5.9.7 Preservasi Kuratif
000.5.9.8 Autentikasi Arsip Statis (antara lain: pembuktian autentisitas, pendapat tenaga ahli, pengujian, penetapan autentitas arsip statis)
000.5.9.9 Akses Arsip Statis (antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber)

000.5.10 Jasa Kearsipan (antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip)
000.5.11 Pengelolaan SIKN dan JIKN
000.5.12 Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
000.5.13 Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
000.5.14 Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
000.5.15 Pengawasan Kearsipan
000.5.15.1 Pengawasan Kearsipan Internal
000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Eksternal
000.5.15.3 Sanksi

000.6 PERSANDIAN

000.6.1 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
000.6.2 Pengamanan persandian
000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto
000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto
000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan
000.6.3 Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian
000.6.3.2 Administrasi Pengkajian

	000.6.3.3	Pelaksanaan
	000.6.3.4	Pelaporan
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian	
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7	Pelaporan

000.7 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/ Musrenbang	
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
000.7.2	Perencanaan Pembangungan Daerah	
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidential
	000.7.2.10	Evaluasi Program
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	
000.7.4	Konsultasi Perencanaan Pembangunan	
000.7.5	Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan	
000.7.6	Aksi Strategis Daerah	
	000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
	000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
	000.7.6.5	Penerapan perencaan aksi strategi daerah
000.7.7	Perencanaan Pendanaan Pembangunan	
	000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah

000.7.7.2 Pendanaan Daerah
000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
000.8.1.1 Pembentukan
000.8.1.2 Pengubahan
000.8.1.3 Pembubaran
000.8.2 Uraian Jabatan
000.8.2.1 Analisa Jabatan
000.8.2.2 Analisa Beban Kerja
000.8.3 Ketatalaksanaan
000.8.3.1 Proses Bisnis
000.8.3.2 Standar Pelayanan
000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
000.8.3.4 Pelayanan Publik
000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
000.8.5 Evaluasi Kelembagaan
000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
000.8.6.1 Budaya Kerja
000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan meliputi: rencana kerja, administrasi penelitian, pelaksanaan, hasil penelitian/pengkajian/ rekomendasi
000.9.3 Sosialisasi dan desiminasi hasil penelitian, hasil pengkajian dan pengembangan
000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan
000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.6.1 Data
000.9.6.2 Statistik
000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
000.9.8 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
000.9.10 Seminar, lokakarya, temukarya, workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus, Daerah Istimewa dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan

100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)

100.1.4.5 Assosiasi Daerah

100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa

100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama

100.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

100.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

100.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah

100.2.4 Fasilitasi Kecamatan

100.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum

100.2.3 Wilayah Administrasi dan Perbatasan

100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah

	100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
	100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
	100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
	100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	**HUKUM**	
100.3.1	Program Legislasi	
	100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
	100.3.1.2	Program Legislasi
100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	
100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
	100.3.3.1	Keputusan / Ketetapan Gubernur
	100.3.3.2	Keputusan / Ketetapan Bupati
	100.3.3.3	Keputusan / Ketetapan Walikota
	100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
	100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
	100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
100.3.4	Instruksi / Surat Edaran	
	100.3.4.1	Instruksi / Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi / Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi / Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	Instruksi / Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat Perintah	
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	Standar/ Pedoman/ Prosedur Kerja/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis	
100.3.7	Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MOU) / Kontrak / Perjanjian kerja sama	
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum, (antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi)	
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
100.3.10	Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian bantuan/ konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	

	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan	
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang
	100.3.13.5	Hak Merk
100.3.14	Permohonan HAKI yang ditolak	

200 POLITIK

200.1 PEMILU

200.1.1	Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
200.1.2	Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	
	200.1.2.1	Ketahanan Ideologi Negara
	200.1.2.2	Wawasan Kebangsaan
	200.1.2.3	Bela Negara
	200.1.2.4	Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
	200.1.2.5	Pembauran dan Kewarganegaraan
200.1.3	Kewaspadaan Nasional	
	200.1.3.1	Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
	200.1.3.2	Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
	200.1.3.3	Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
	200.1.3.4	Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
	200.1.3.5	Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
200.1.4	Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan	
	200.1.4.1	Ketahanan Seni
	200.1.4.2	Ketahanan Budaya
	200.1.4.3	Agama dan Kepercayaan
	200.1.4.4	Organisasi Kemasyarakatan
	200.1.4.5	Masalah Sosial Kemasyarakatan
	200.1.4.6	Fasilitasi
	200.1.4.7	Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri	

200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
200.1.5.6 Pemerintah Daerah
200.1.5.7 Database Parpol
200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
200.1.5.9 Pemilihan Umum

200.1.6 Ketahanan Ekonomi
200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat
200.1.6.4 Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2 PEMILU

200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah

		kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	270.04.05	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
	200.2.6.2	Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
	200.2.6.3	Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
200.2.7	Dana Kampanye	
	200.2.7.1	Pedoman audit dana kampanye
	200.2.7.2	Laporan dana kampanye peserta Pemilu
	200.2.7.3	Laporan hasil audit dana kampanye
200.2.8	Pemungutan dan Penghitungan Suara	
	200.2.8.1	Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
	200.2.8.2	Master surat suara
	200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
	200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
	200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
200.2.9	Penetapan Hasil Pemilu	
200.2.10	Perselisihan Hasil Pemilu	
	200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
	200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
	200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
200.2.11	Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu	

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1	Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah	
300.1.2	Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja	
	300.1.2.1	Tata Operasiona Polisi Pamong Praja
	300.1.2.2	Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
300.1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja	

300.1.4 Perlindungan Masyarakat
300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
300.2.2.6 Registrasi BEACON
300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
300.2.8 Operasi Komunikasi
300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)
300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
300.2.8.3 Registrasi BEACON
300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan
300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi
300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi
300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi
300.2.12.1 Laporan Harian
300.2.12.2 Laporan Bulanan
300.2.12.3 Laporoan Tahunan
300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1	Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.1.2	Pembangunan Sumber Daya	
	400.1.2.1	Fasilitasi Pendidikan ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.2	Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.3	Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
	400.1.2.4	Fasilitasi Mineral, energi dan lingkungan hidup
	400.1.2.5	Fasilitasi Teknologi dan inovasi
	400.1.2.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya
	400.1.2.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.3	Peningkatan Infrastruktur	
	400.1.3.1	Fasilitasi Transportasi peningkatan infrastruktur
	400.1.3.2	Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.3	Fasilitasi Sosial dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam peningkatan infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal

400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5 Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal
400.1.5.2 Penguatan organisasi masyarakat
400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat
400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
400.1.5.5 Ketenagakerjaan
400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi
400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus
400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar
400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
400.2.2.1 Data gender
400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi
400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
400.2.3.2 Data perlindungan perempuan
400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender
400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

400.2.4.2 Data perlindungan anak
400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi
400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)
400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak
400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak
400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak
400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi
400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak
400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)
400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak
400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal
400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)
400.3.2.2 Pelatihan Sosial
400.3.2.3 Peringatan Hari anak
400.3.2.4 Block Grant

400.3.3 Pendidikan Masyarakat
400.3.3.1 Penyelenggaraan Program
400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial
400.3.3.3 Pembinaan Program
400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan
400.3.3.5 Pameran
400.3.3.6 Rakor
400.3.3.7 Sosialisasi
400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi

400.3.4 Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik
400.3.5 Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama
400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar
400.3.5.2 Block Grant
400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan
400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS)
400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin

400.3.6 Pendidikan khusus/Layanan Khusus
400.3.6.1 Kurikulum,Bahan ajar, alat bantu pembelajaran
400.3.6.2 Block Grant

	400.3.6.3	Lomba, festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Setifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.7	Block grant
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan	
	400.3.11	Penilaian Akademik
	400.3.12	Penilaian Non Akademik
	400.3.13	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan

400.3.12.2 Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13 Prasarana dan Sarana Pendidikan
400.3.13.1 Prasarana Pendidikan
400.3.13.2 Sarana Pendidikan
400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN
400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan
400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi
400.4.3.1 Olahraga Massal
400.4.3.2 Olahraga Tradisional
400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan wisata
400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan sekolah Khusus Olahraga
400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
400.4.4.3 Olahraga Prestasi
400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga
400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
400.4.5.1 Olahraga Tradisional
400.4.5.2 Layanan Khusus
400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
400.4.6.2 Penghargaan Olahraga
400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga
400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
400.4.7.2 Kompetisi
400.4.7.3 IPTEK Olahraga
400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan
400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga
400.4.9.1 Industri Olahraga
400.4.9.2 Promosi Olahraga
400.4.10 Olahraga Prestasi
400.4.10.1 Daerah
400.4.10.2 Nasional
400.4.10.3 Internasional
400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN
400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)
400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
400.5.2.3 Pengembangan
400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda
400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan
400.5.3.2 Wawasan Lingkungan
400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum
400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda
400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa
400.5.4.2 Kapasitas IPTEK
400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK
400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
400.5.5.1 Pengkajian
400.5.5.2 Pengembangan
400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)
400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
400.5.6.1 Kepemimpinan: Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
400.5.7 Kewirausahaan
400.5.7.1 Kelembagaan
400.5.7.2 Pengaderan
400.5.7.3 Perintisan
400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.3 Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
400.5.8.4 Pengawasan Kepramukaan: Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9 Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
400.5.9.1 Standardisasi
400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda

400.5.10 Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
400.5.10.1 Kemitraan
400.5.10.2 Penghargaan Pemuda

400.6 KEBUDAYAAN
400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.6.2 Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
400.6.2.1 Registrasi Nasional
400.6.2.2 Pelindungan
400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan

400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3 Pembinaan Kesenian dan Perfilman
400.6.3.1 Pembinaan Seni Pertunjukan
400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa
400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4 Sejarah dan Nilai Budaya
400.6.4.1 Sejarah
400.6.4.2 Pemetaan nilai
400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai
400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5 Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya
400.6.5.2 Kekayaan budaya
400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia
400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN
400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar
400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga
400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer
400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology
400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah
400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer
400.7.2.9 Pembiayaan darah
400.7.2.10 Penggunaan darah rasional
400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
400.7.2.13 Akreditasi puskesmas
400.7.2.14 Puskesmas berprestasi
400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan
400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan
400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat
400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan

	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer

	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga
400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	

400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27 Promosi Kesehatan
400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan
400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
400.7.27.3 Pengembangan pesan promosi kesehatan
400.7.27.4 Hari kesehatan
400.7.28 Data dan Informasi
400.7.28.1 Statistik kesehatan
400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi
400.7.28.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400.7.29.1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400.7.29.4 Obat Asli Indonesia
400.7.30 Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
400.7.30.1 Penilaian keamanan pangan
400.7.30.2 Standardisasi produk pangan
400.7.30.3 Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
400.7.30.4 Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan
400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya
400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN
400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.8.2 Fasilitasi
400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Prov/Kab/Kota
400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan
400.8.2.4 Kasus Keagamaan
400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan
400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME
400.8.3.1 Kelembagaan dan kepercayaan
400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan

	400.8.3.4	Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional
	400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	**SOSIAL**	
400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak	
	400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
	400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
	400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
	400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
	400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
400.9.3	Rehabilitasi Sosial	
	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban traffking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial

	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan vrifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
	400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
	400.9.14.5	Bantuan Langsung
	400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
400.9.15	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
	400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
	400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial
400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa
400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa
400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
400.10.3.1 Lembaga Masyarakat
400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif
400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat
400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan
400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat
400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
400.10.4.1 Budaya Nusantara
400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan
400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial
400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan
400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat
400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan
400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran
400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga
400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal
400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan
400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan
400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan
400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan
400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan
400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.11.2 Pertamanan
400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan
400.11.2.2 Taman Kota
400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota
400.11.3 Pemakaman
400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman
400.11.3.2 Pemakaman
400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman
400.11.4 Jalur Hijau
400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau
400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan
400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
400.11.5 Peran Serta Masyarakat
400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
400.11.7 Pengelolaan Data
400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
400.12.2 Pendaftaran Penduduk
400.12.2.1 Identitas Penduduk
400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3 Pencatatan Sipil
400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan
400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
400.12.5.2 Kualitas Penduduk
400.12.5.3 Mobilitas Penduduk

400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
400.12.6 Penyerasian Kependudukan
400.12.6.1 Indikator Kependudukan
400.12.6.2 Proyeksi Penduduk
400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan
400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA
400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
400.13.7 Pengembangan Sistem
400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.8 Pengembangan Materi
400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
400.13.9 Monitoring dan Evaluasi
400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.10 Analisis Sosial
400.13.11 Analisis Ekonomi
400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
- 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
- 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan
- 400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan
- 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
- 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria
- 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria
- 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria

400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak
- 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak

400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak
400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja
400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja
400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
400.13.41 Advokasi dan pencitraan
400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi
400.13.42.1 Promosi
400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi
400.13.42.3 Produk media komunikasi
400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
400.13.46 Tenaga Lini Lapangan
400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan
400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan
400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan
400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan
400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan
400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data
400.13.51 Analisis dan evaluasi
400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk

400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data
400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi
400.13.52.2 Pengelolaan bank data
400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi
400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan
400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1 Keprotokolan
400.14.1.1 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara,pelantikan,peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
400.14.1.2 Buku tamu Keprotokolan
400.14.1.3 Agenda kegiatan pimpinan daerah
400.14.1.4 Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
400.14.2 Daftar nama/alamat kantor /pejabat
400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas,foto/ video/ rekaman suara/ multi media
400.14.4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
400.14.4.1 Kliping koran
400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat
400.14.4.3 Pengumuman /pemberitaan
400.14.5 Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah
400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan
400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL)
400.14.5.5 Forum Kehumasan
400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa
400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD
400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten
400.14.8 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal
400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik
400.14.10 Pameran /sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan
400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan

400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah
500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
500.1.2.1 Ketersediaan Pangan
500.1.2.2 Akses Pangan
500.1.2.3 Kerawanan Pangan
500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan
500.1.3.1 Distribusi Pangan
500.1.3.2 Harga Pangan
500.1.3.3 Cadangan Pangan
500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan
500.1.4.1 Konsumsi Pangan
500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan
500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar
500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan
500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan
500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan
500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)
500.1.7 Bimbingan Teknis
500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri
500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha
500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan
500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan
500.2.2.4 Informasi Perusahaan
500.2.2.5 Pelaku Pasar
500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah
500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal
500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri
500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi
500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi
500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
500.2.2.14 Informasi Pasar
500.2.2.15 Informasi Hasil Industri
500.2.2.16 Barang Strategis
500.2.2.17 Bahan Pokok Agro
500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar

	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
	500.2.4.1	Pengkajian pasar
	500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
	500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
	500.2.4.4	Pengkajian pasar
	500.2.4.5	Pengembangan Pasar
	500.2.4.6	Sistem informasi
	500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
	500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
	500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
500.2.5	Bimbingan Teknis	
500.2.6	Evaluasi	

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL

500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
	500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
	500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
	500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
	500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
500.3.3	Produksi	
	500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
	500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
	500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
	500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
	500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

500.3.4 Pembiayaan
- 500.3.4.1 Program Pendanaan
- 500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
- 500.3.4.3 Urusan Permodalan
- 500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan
- 500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
- 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)

500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha
- 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri
- 500.3.5.2 Ekspor dan Impor
- 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran
- 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
- 500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis
- 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia
- 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan
- 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
- 500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat
- 500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
- 500.3.6.5 Advokasi

500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
- 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu
- 500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha
- 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
- 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK
- 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis

500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK
- 500.3.8.1 Penelitian Koperasi
- 500.3.8.2 Penelitian UKM
- 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya
- 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga

500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)
- 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan
- 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana

500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

500.4 KEHUTANAN

500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.4.2 Penyuluhan
- 500.4.2.1 Program Kerja Penyuluhan
- 500.4.2.2 Materi Penyuluhan
- 500.4.2.3 Program Penyuluhan
- 500.4.2.4 Sarana Penyuluhan
- 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan
- 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan
- 500.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat
- 500.4.2.8 Deseminasi

	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
500.4.3	Planologi Kehutanan	
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	
	500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
	500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.3	Kerjasama
	500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
	500.4.4.5	Perpanjangan
	500.4.4.6	Modal dan Peralatan
	500.4.4.7	Investasi Industri
	500.4.4.8	Peralatan
	500.4.4.9	Tenaga Kerja
	500.4.4.10	Pemegang Saham
	500.4.4.11	Neraca Perusahaan
	500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
	500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
	500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
	500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
	500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
	500.4.4.17	Produksi Kayu
	500.4.4.18	Produksi non kayu
	500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK

	500.4.4.21	Industri Non Kayu
	500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
	500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
	500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
	500.4.4.25	Pemblokiran
	500.4.4.26	Denda
	500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
	500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
	500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha
	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan

	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN

500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.5.2	Perikanan Tangkap	
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor

	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
	500.5.7.21	Lokasi Karantina
500.6	**PERTANIAN**	
500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.6.2	Perlindungan hortikultura	
	500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
	500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
	500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
	500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
500.6.3	Perbenihan Hortikultura	
	500.6.3.1	Penilaian Varietas
	500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
	500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan	
	500.6.4.1	Basis Data Lahan

	500.6.4.2	Pengendalian Lahan
	500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
	500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi	
	500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
	500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air
	500.6.5.3	Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
	500.6.5.4	Kelembagaan
500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
	500.6.6.1	Pembiayaan Program
	500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
	500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
	500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
500.6.7	Pupuk Pestisida	
	500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenah Tanah
	500.6.7.2	Pupuk Anorganik
	500.6.7.3	Pestisida
	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim

	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikurtura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan
500.6.15	Mutu dan Standariasi	
	500.6.15.1	Standardisasi
	500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
	500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
	500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
500.6.16	Pengembangan Usaha dan Investasi	
	500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
	500.6.16.2	Investasi
	500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
	500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
500.6.17	Pemasaran Domestik	
	500.6.17.1	Informasi Pasar
	500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
	500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
	500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
500.6.18	Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, Antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat	
500.6.19	Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
	500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
	500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
500.6.20	Diseminasi	
500.6.21	Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian	
	500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
	500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya
500.6.22	Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan	
500.6.23	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan	
500.6.24	Data Penelitian dan Pengembangan	
500.6.25	Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan	
500.6.26	Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	
	500.6.26.1	Hak Cipta
	500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
	500.6.26.3	Hak Paten Biasa

500.6.26.4 Hak Merek
500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28 Pelayanan Hukum
500.6.28.1 Sertifikasi
500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
500.6.29 Karantina Pertanian
500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
500.6.29.2 Karantina Hewan
500.6.30 Bimbingan Teknis
500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN
500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
500.7.2.1 Perbibitan Ternak, Antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7.2.2 Pakan Ternak
500.7.2.3 Budidaya Ternak
500.7.2.4 Kesehatan Hewan, Antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan
500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, Antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7.3 Bimbingan Teknis

500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim

500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim

500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3 Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah & Penyegar

500.8.4 Tanaman Tahunan

500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan

500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan

500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan

500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan

500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan

500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan

500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha

500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan

500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan

500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama

	500.9.2.1	Industri Manufaktur
	500.9.2.2	Industri Agro
	500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.3	Promosi Industri	
	500.9.3.1	Industri Manufaktur
	500.9.3.2	Promosi Industri Agro
	500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.4	Standarisasi dan Teknologi	
	500.9.4.1	Industri Manufaktur
	500.9.4.2	Industri Agro
	500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.5	Hak dan Kekayaan Intelektual	
	500.9.5.1	Industri Manufaktur
	500.9.5.2	Industri Agro
	500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.6	Industri Hijau	
	500.9.6.1	Industri Manufaktur
	500.9.6.2	Industri Agro
	500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
	500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota	
500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	
500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri	
500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional	
500.9.12	Standarisasi	
	500.9.12.1	Standar
	500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
	500.9.12.3	Infrastruktur Standar
500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
	500.9.13.1	Kebijakan Industri
	500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
	500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
	500.9.14.1	Industri Hijau
	500.9.14.2	Lingkungan Hidup
	500.9.14.3	Energi
500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
	500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
	500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
	500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	

500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

500.10.1	Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.10.2	Rekomendasi Kegeologian	
	500.10.2.1	Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
	500.10.2.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.2.3	Pertambangan
	500.10.2.4	Panas Bumi
	500.10.2.5	Geosains
	500.10.2.6	Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
	500.10.2.7	Kelayakan Lingkungan
500.10.3	Penelitian Kegeologian	
	500.10.3.1	Administrasi pelaksanaan penelitian
	500.10.3.2	Administrasi tenaga penelitian
	500.10.3.3	Administrasi penggunaan peralatan penelitian
	500.10.3.4	Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
	500.10.3.5	Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
	500.10.3.6	Sumber Daya Geologi
	500.10.3.7	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.3.8	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.3.9	Survei Geologi
500.10.4	Inventarisasi dan evaluasi kegeologian	
	500.10.4.1	Sumber Daya Geologi
	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi

	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)
	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan)
	500.10.7.3	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi)
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	

	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, Antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), Antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, Antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, Antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala

		Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, Antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru LasQualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las

	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi

	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE
	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, Antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, Antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan
500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, Antara lain: Pelayanan izin usaha penyediaan tenaga listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data laporan berkala pemegang Izin
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, Antara lain: Penanganan

		pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, Antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan

	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan
500.10.25	Bina Program Mineral dan Batubara	
	500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
	500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
	500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
	500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
	500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
	500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
	500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
	500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara
500.10.26	Pembinaan Pengusahaan Mineral	
	500.10.26.1	Ketenagakerjaan
	500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
	500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
	500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)

	500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), Antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), Antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist)
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), Antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional
	500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
	500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
	500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, Antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, Antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan
	500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
	500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
	500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
	500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, Antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang

	500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan, Antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) pelaksanaan reklamasi
	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, Antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, Antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis, Antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Peminaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prototipe hasil penelitian/pengkajian/pengembangan/inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan
	500.10.32.4	Penyajian Informasi
500.10.33	Penelitian dan Pengembangan Kegeologian	
	500.10.33.1	Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan
	500.10.33.2	Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai
	500.10.33.3	Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan
	500.10.33.4	Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan
500.10.34	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.34.1	Teknologi Eksplorasi
	500.10.34.2	Teknologi Eksploitasi
	500.10.34.3	Laboratorium
	500.10.34.4	Study
	500.10.34.5	Teknologi Proses
	500.10.34.6	Teknologi Aplikasi Produk
	500.10.34.7	Teknologi Gas
500.10.35	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara	
	500.10.35.1	Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya
	500.10.35.2	Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral
	500.10.35.3	Teknologi Pemanfaatan Batubara
500.10.36	Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan	

500.10.36.1 Energi baru terbarukan
500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan
500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi
500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN

500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan
500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan
500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor
500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor
500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor
500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan

	500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
500.11.7	Perlengkapan Jalan	
	500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan
	500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan
	500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor
	500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional
500.11.8	Angkutan Penumpang	
	500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi
	500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara
	500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi
	500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi
	500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum
	500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum
	500.11.8.7	Angkutan perintis
	500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum
500.11.9	Angkutan Barang	
	500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.9.2	Tarif angkutan barang
	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
	500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan
	500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan
	500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
	500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan
	500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah
500.11.24	Angkutan Perkotaan	
	500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek
	500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan
	500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
	500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang
	500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi
	500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi
500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
	500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan
	500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan
	500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan
	500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota

	500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan
	500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan
500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
	500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan
	500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian
	500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
	500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan
500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
	500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan
500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
	500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum
	500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau
500.11.31	Audit Keselamatan	
	500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia
	500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
	500.11.32.1	Pedoman keselamatan
	500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan
	500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan
500.11.33	Parkir	

500.11.33.1 Surat Tugas Juru Parkir
500.11.33.2 Izin tempat khusus parkir swasta
500.11.33.3 Surat Tugas TKP Pemerintah

500.12 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

500.12.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.12.2 Telekomunikasi
500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi
500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi
500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi
500.12.3 Penyiaran
500.12.3.1 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.3.2 Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
500.12.4 Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal
500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
500.12.4.2 Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran
500.12.4.4 Pelayanan Kewajiban Universal
500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur
500.12.5 Pengendalian Informatika
500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
500.12.5.2 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
500.12.5.4 Pencegahan dan Penertiban
500.12.6 e- Government
500.12.6.1 Tata Kelola e-Government
500.12.6.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Government
500.12.6.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
500.12.6.4 Aplikasi Layanan Kepemerintahan
500.12.6.5 Aplikasi Layanan Publik
500.12.7 e- Business
500.12.7.1 Tata Kelola e-Business
500.12.7.2 Teknologi dan Infrastruktur e-Business
500.12.7.3 Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
500.12.7.4 Aplikasi Layanan e-Busniness
500.12.8 Pemberdayaan Informatika Masyarakat
500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
500.12.8.2 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9 Pemberdayaan Industri Informatika
500.12.9.1 Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika

500.12.9.2 Industri Perangkat Informatika Pengguna
500.12.9.3 Industri Perangkat Lunak
500.12.9.4 Industri Konten Multimedia
500.12.10 Keamanan Informasi
500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Informasi
500.12.10.2 Teknologi Keamanan Informasi
500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan
500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi
500.12.11 Komunikasi Publik
500.12.11.1 Tata Kelola Komunikasi Publik
500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik
500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik
500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi
500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
500.12.12.2 Informasi Perekonomian
500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13 Pengelolaan Media Publik
500.12.13.1 Media Cetak
500.12.13.2 Media Online
500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14 Kemitraan Komunikasi
500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15 Infrastruktur Informatika
500.12.15.1 Jaringan
500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
500.12.15.3 Keamanan Informatika
500.12.16 Sistem dan Data
500.12.16.1 Portal dan Konten
500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
500.12.17 Pusat Kerjasama
500.12.17.1 Kerja Sama daerah
500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
500.12.18.1 Pelayanan Informasi
500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
500.12.18.3 Bimbingan Teknis
500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata

500.13.2.3 Industri Pariwisata
500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
500.13.2.5 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
500.13.3 Pemasaran Pariwisata
500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri
500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri
500.13.3.4 Pencitraan Indonesia
500.13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya
500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman
500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa
500.13.5 Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK
500.13.5.1 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
500.13.5.2 Desain dan Arsitektur
500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi
500.13.6 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
500.13.6.2 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
500.13.6.3 Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
500.13.6.4 Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

500.14 STATISTIK
500.14.1 Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.14.2 Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
500.14.2.1 Perencanaan
500.14.2.2 Persiapan, Antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan

		koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, Antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
	500.14.3.4	Pengolahan, Antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
	500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, Antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan
	500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
500.14.4	KonsolidasiI Data Statistik	
	500.14.4.1	Kompilasi Data
	500.14.4.2	Analisis data
	500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	

500.15 KETENAGAKERJAAN

500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja

	500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
	500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
	500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
	500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
	500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antar Kerja
	500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
	500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
	500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja

500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
- 500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal
- 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya
- 500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna
- 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga

500.15.11 Standardisasi Profesi
- 500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi
- 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi

500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi
- 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
- 500.15.12.2 Perjanjian Kerja
- 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja
- 500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja

500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial
- 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha
- 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial
- 500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial

500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.14.1 Pengupahan
- 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial
- 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja
- 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
- 500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja

500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
- 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan
- 500.15.17.2 Pengawasan Norma Kerja Anak
- 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral
- 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak

500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan

500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan
500.15.20 Bina Penegakan Hukum
500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum
500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3
500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3
500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3
500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL
500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal
500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur

500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan
500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur
500.16.3 Pengembangan Iklim Penanaman Modal
500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal
500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah
500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha
500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
500.16.3.6 Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4 Promosi Penanaman Modal
500.16.4.1 Pengembangan Promosi
500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi
500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri
500.16.4.4 Promosi Sektoral
500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah
500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5 Kerja Sama Penanaman Modal
500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
500.16.5.2 Kerja Sama Regional
500.16.5.3 Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal
500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal
500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
500.16.6.4 Fasilitasi Penyelesaian Masalah
500.16.6.5 Pengawasan Penanaman Modal
500.16.6.6 Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500.16.7 Pelayanan Penanaman Modal
500.16.7.1 Pelayanan Aplikasi
500.16.7.2 Pelayanan Perijinan
500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN
500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
500.17.4 Sengketa Tanah

500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
500.18.3.1 Penyiapan Lahan
500.18.3.2 Penyiapan Sarana
500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
500.18.5 Partisipasi Masyarakat
500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
500.18.5.4 Pelayanan Investasi
500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8 Pengembangan Usaha
500.18.8.1 Kewirausahaan
500.18.8.2 Produksi
500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
500.18.9.2 Pengembangan Sarana

500.18.9.3 Pengembangan Prasarana
500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10 Penyerasian Lingkungan
500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai
600.1.2.2 Kelembagaan
600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air
600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air
600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan
600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air
600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.3.2 Manajemen Mutu
600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air
600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman
600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air
600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai
600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa
600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai
600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa
600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung
600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku
600.1.5.5 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.7 Pengembangan Jaringan Jalan
600.1.7.1 Keterpaduan Perencanaan
600.1.7.2 Sistem Jaringan Jalan
600.1.7.3 Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8 Pembangunan Jalan
600.1.8.1 Standar dan Pedoman
600.1.8.2 Manajemen Konstruksi

	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar
	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

600.1.16.7 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
600.1.17.1 Perencanaan Teknis
600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
600.1.17.5 Kelembagaan
600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
600.2.2.3 Kemitraan
600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan
600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
600.2.5.2 Analisa Teknik
600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan
600.2.6 Penyediaan Rumah Susun
600.2.6.1 Perencanaan Teknik
600.2.6.2 Penyediaan
600.2.6.3 Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
600.2.6.4 Pengelolaan
600.2.7 Penyediaan Rumah Khusus
600.2.7.1 Perencanaan Teknik
600.2.7.2 Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
600.2.7.3 Bimbingan teknis dan supervisi
600.2.7.4 Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya

	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	
	600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
	600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
	600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
	600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
600.2.13	Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	
	600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
	600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi
600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
	600.2.14.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja
	600.2.14.2	Pelaksanaan Pengendalian Mutu
600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
	600.2.15.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi
	600.2.15.2	Pengembangan Materi
	600.2.15.3	Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi
600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
	600.2.16.1	Antar Sektor
	600.2.16.2	Antar Wilayah
600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	

600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis
600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis
600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan
600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan
600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru
600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan
600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan
600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)
600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)
600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah
600.3.2 Perencanaan
600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)
600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten
600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)
600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten
600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota
600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota
600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian
600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang
600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang
600.3.4 Pemetaan
600.3.4.1 Peta Dasar
600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat
600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air
600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP
600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan

	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
600.4.5	Dampak Lingkungan	
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim antara lain : Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan

	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	
	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat	
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan	
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24	Kelembagaan Lingkungan	
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan

600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan
600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN
700.1 PENGAWASAN INTERNAL
700.1.1 Rencana Pengawasan
700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan
700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan
700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)
700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN
800.1 SUMBER DAYA MANUSIA
800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Antara lain : Bahan penyusunan rencana kebutuhan,

		Analisis Kebutuhan, Pengolahan data kebutuhan
	800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi Antara lain : Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
	800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
	800.1.1.4	Standarisasi Jabatan Antara lain : Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai	
	800.1.2.1	Formasi ASN Antara lain : Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
	800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN Antara lain : Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di

		Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit Antara lain : Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN Antara lain : Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Janda/ Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN

	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi	
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi

800.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat

800.2.2.4	Modul-modul diklat
800.2.2.5	Panduan fasilitator
800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800.2.3	Widyaiswara
800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
800.2.4	Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
800.2.4.5	Sistem informasi diklat
800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
800.2.5	Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)
900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan

	900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
	900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
	900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran	
	900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
	900.1.3.2	Pendapatan
	900.1.3.3	Belanja
	900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
	900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
	900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
	900.1.3.7	Daftar Gaji
	900.1.3.8	Kartu Gaji
	900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
	900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri	
	900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
	900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)
	900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
	900.1.4.4	Dokumen Loan Agremeent (PHLN) Antara lain : Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
	900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana
	900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
	900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
	900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, yaitu : Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, a.l. : SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya.
	900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA),

	900.1.4.10	Staff Appraisal Report
	900.1.4.11	Report /Laporan
	900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
	900.1.4.13	Completion Report/Annual Report
	900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.5	Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)	
900.1.6	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)	
	900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
	900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
	900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
	900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
900.1.7	Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
	900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya : SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
	900.1.7.3	Buku Rekening Bank
	900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
	900.1.7.5	Pembukuan anggaran terdiri antara lain : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
900.1.8	Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan	
	900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
	900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu Dari APBD meliputi: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

- 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
- 900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
- 900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
- 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

- 900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
- 900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
- 900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
- 900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah

900.1.12 Anggaran Daerah

- 900.1.12.1 Anggaran Daerah
- 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah

900.1.13	Pendapatan dan Investasi Daerah	
	900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Antara lain : fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
	900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
	900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah Antara lain : analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
	900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah Antara lain : fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

	900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah Antara lain : fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
	900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
	900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus
	900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam Antara lain : Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
	900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya Antara lain : Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

	900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
	900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
	900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
	900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
	900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli Antara lain : Penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Antara lain : Penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, Pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.	

Pj. WALI KOTA SALATIGA,

ttd

SINOENG N. RACHMADI